

DOMINASI KEPENTINGAN POLITIK SEMPIT DAN KRISIS KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERWAKILAN

Fiandani Rizki Prastiasa¹, Sri Bahmiati², Aulia Deshinta Putri³, Ahmad Friko Huda Nassirudin⁴, Day Ramadhani Amir⁵

¹²³⁴⁵Pendidikan Teknologi Informasi, FPMIPA IKIP PGRI Bojonegoro
Jl. Panglima Polim No.46, Bojonegoro

¹e-mail: fiandani12345@gmail.com

²e-mail: sribahmiati@gmail.com

³e-mail: auliadeshinta20@gmail.com

⁴e-mail: Friko1712120@gmail.com

⁵e-mail: day.ramadhani@ikippgribojonegoro.ac.id

(Diterima : 3 Mei 2024 , direvisi : 16 Mei 2024 , disetujui: 30 Mei 2024)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuat masyarakat agar meningkatkan kepercayaannya pada lembaga perwakilan kembali. Metode penelitian ini adalah dengan menganalisis kajian literatur yang sudah ada supaya masyarakatnya mendapatkan informasi menjadikan kepercayaan (menjelaskan kepada masyarakatnya agar percaya kepada wakil rakyat). Lembaga perwakilan diwujudkan sebagai pengemban kewenangan legislatif yang pelaksanaannya dinilai kurang penting dibandingkan dengan kinerja fungsi anggaran dan pengendalian. faktor kerjasama antar anggota Lembaga perwakilan dalam penyusunan dan pembentukan kebijakan, proses legislasi Lembaga perwakilan dan UU No. 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang fungsi lembaga legislatif, menghilangkan salah satu fungsi lembaga legislatif dengan menghadirkan RUU yang juga berdampak pada minimnya produk legislasi yang dihasilkan Lembaga perwakilan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait kinerja fungsi legislasi.

Kata Kunci: Lembaga Perwakilan, Fungsi Legislasi

Abstract

The purpose of this journal is for the reader to understand the problem in government agency leadership in Indonesia, for this context is about cramped politic importance and Indonesia people scepticism to government agency, the method we gonna use is doing literature research to understand the exist information and analyze survey data in the internet, even so we will try to look for the data from trustable source by doing research multiple times. In Indonesia there still lots of political figure or group that is prioritizing too much on their personal and group importance Without pay attention morality, ethic, and long term impact that could lead to people skepticism to government agency.

Keyword: politic, agency, government, country

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi yang telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam bidang politik dan pemerintahan. Salah satu masalah yang semakin menonjol adalah dominasi kepentingan politik sempit dalam proses legislasi dan pemerintahan, yang

Fiandani Rizki P., dkk. Dominasi Kepentingan Politik Sempit dan Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan

berdampak langsung pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perwakilan mereka di parlemen. Hal ini terlihat dari berbagai kasus korupsi, konflik kepentingan, serta keputusan politik yang lebih sering menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas. Situasi ini menyebabkan keterasingan publik dari proses politik, mengikis legitimasi demokrasi, dan memicu apatisme politik. (Aji, I., 15 Mei 2023)

Dominasi kepentingan politik sempit sering kali tampak dalam praktik oligarki di partai politik dan legislasi yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok kecil daripada kepentingan umum. Menurut Liddle, R. (2022), banyak politisi di Indonesia cenderung memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil dibandingkan memperjuangkan kepentingan umum. Hal ini diperburuk dengan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang sering kali tidak mampu mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keadaan ini menciptakan kesan bahwa politik hanya menguntungkan segelintir elite, sementara kebutuhan dan aspirasi masyarakat umum terabaikan.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil mereka di parlemen juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas komunikasi dan keterlibatan antara perwakilan dan konstituen. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa aspirasi mereka tidak didengar atau diabaikan oleh para politisi. Hal ini menimbulkan frustrasi dan kekecewaan yang mendalam, mendorong masyarakat untuk menarik diri dari partisipasi politik aktif. Akibatnya, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal representasi yang efektif dan akuntabel.

Dampak dari dominasi kepentingan politik sempit dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perwakilan ini tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga stabilitas sosial dan politik secara keseluruhan. Sebagai negara yang besar dan beragam, Indonesia membutuhkan sistem politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warganya. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan memahami lebih lanjut dinamika yang menyebabkan terjadinya fenomena ini serta mencari solusi yang dapat

meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat institusi demokrasi. (Harsono, A. 2024)

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Metode pencarian informasi ini mengumpulkan data atau sumber yang berkaitan dengan topik penelitian dan dikenal sebagai studi literatur (Habsy dalam Parinata, 2022). Penelitian ini juga berfokus pada fungsi atau penerapan sila ke empat untuk kepemimpinan lembaga perwakilan terhadap rakyat. Dalam jurnal ini, penulis mencari sumber teori, yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Proses studi literatur terdiri dari membaca, menulis, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan tema jurnal yang dibahas dalam jurnal ini. Peneliti memanfaatkan jurnal, buku, artikel, website dan lain-lain untuk mencari data dan sumber informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi Kepentingan Politik Sempit

Dominasi kepentingan politik sempit di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai kasus yang melibatkan politisi dan partai politik. Politisi sering kali terlibat dalam praktik-praktik korupsi dan kolusi, yang lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat luas. Laporan Transparency International (2022) menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam Indeks Persepsi Korupsi, dengan skor 34 dari 100, menempatkannya di peringkat ke-110 dari 180 negara. Praktik semacam ini memperlihatkan bagaimana kepentingan politik sempit mendominasi kebijakan dan keputusan politik, mengesampingkan kepentingan umum.

Lebih lanjut, praktik oligarki di dalam partai politik juga memperparah situasi ini. Menurut Winters, J. (2021), banyak partai politik di Indonesia dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki kekuasaan besar dan sering kali menentukan

Fiandani Rizki P., dkk. Dominasi Kepentingan Politik Sempit dan Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan

arah kebijakan partai berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan politik di Indonesia kurang demokratis dan inklusif, serta menghalangi partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Oligarki dalam partai politik ini menghambat munculnya kebijakan yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dan lebih fokus pada memperkuat kekuasaan elite politik.

Menurunnya Kepercayaan Masyarakat

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil mereka di parlemen adalah fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (2023), hanya sekitar 30% masyarakat yang masih percaya bahwa wakil mereka di parlemen bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagian besar merasa bahwa politisi lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Survei ini dirilis pada 10 Desember 2023, menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini untuk segera diatasi.

Media massa juga sering kali melaporkan berbagai skandal yang melibatkan anggota parlemen, yang semakin memperburuk citra lembaga legislatif di mata masyarakat. Sebagai contoh, sebuah artikel di Kompas (2023) mengungkapkan berbagai kasus penyalahgunaan wewenang oleh anggota DPR, mulai dari penerimaan suap hingga keterlibatan dalam proyek-proyek pemerintah yang sarat dengan kepentingan pribadi. Publikasi semacam ini memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap parlemen dan politisi.

Dampak Sosial dan Politik

Dampak dari dominasi kepentingan politik sempit dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perwakilan mereka sangat merugikan. Demokrasi di Indonesia terancam mengalami kemunduran jika kondisi ini terus dibiarkan. Masyarakat yang merasa aspirasinya tidak diperhatikan cenderung menjadi apatis dan enggan berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini dapat mengurangi legitimasi pemerintah dan menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Selain itu, stabilitas sosial juga dapat terganggu. Ketidakpercayaan terhadap institusi politik bisa memicu ketidakpuasan dan protes sosial, yang

Fiandani Rizki P., dkk. Dominasi Kepentingan Politik Sempit dan Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan

dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam stabilitas nasional. Sebuah studi oleh Hadiz, V. (2023) menyebutkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menjadi pemicu utama berbagai gerakan protes dan ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tanggapan Terhadap Isu Korupsi

Korupsi tetap menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut Asniawati (2023), berbagai pejabat negara terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat. Contoh kasus terbaru melibatkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Hiariej, yang menerima suap sebesar Rp 7 miliar dari sebuah perusahaan tambang nikel. Selain itu, Bupati Bogor, Rachmat Yasin, pada tahun 2020 ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gratifikasi sekitar Rp 8,9 miliar dari SKPD Kabupaten Bogor. Suap dan gratifikasi ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang sangat merugikan masyarakat karena dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Analisis Ahli dan Perspektif Internasional

Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, berpendapat bahwa para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat telah mengendalikan Indonesia, sementara para anggota DPR hanyalah pion. Ia menyatakan bahwa kebobrokan negara ini disebabkan oleh ketidakmampuan partai politik dalam menjalankan fungsinya. Irman juga mengkritik partai politik yang mengabaikan tujuan bernegara dan hanya fokus pada pemilihan lima tahunan, yang menurutnya, jika tidak diubah, Indonesia tidak akan mengalami perubahan signifikan dalam 10 atau 20 tahun ke depan. (Fiansyah, R, 2013)

Rohaniawan Romo Benny Susetyo menambahkan kritik terhadap partai politik yang diisi oleh individu-individu tanpa visi. Mengutip filsuf Yunani, Aristoteles, Benny menyatakan bahwa negara seharusnya dipimpin oleh filsuf yang memiliki gagasan, bukan oleh pedagang atau prajurit. Benny menekankan

bahwa politik saat ini dipenuhi oleh aktivitas bisnis dan transaksi, bukan oleh pertarungan ide dan gagasan.

Kepercayaan terhadap pemerintah telah menurun hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Fukuyama (2021) berpendapat bahwa penurunan ini bukan hanya terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga selama beberapa dekade terakhir. Tingkat pendidikan global masyarakat lebih kritis dan menuntut transparansi. Masyarakat kini ingin terlibat lebih dalam dalam pengambilan keputusan politik dan perumusan anggaran nasional.

Namun, meningkatnya kritik terhadap pemerintah tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang merugikan negara. Dalam sebuah video wawancara, Fukuyama menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih mengakomodasi kritik yang muncul di era modern, karena masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui situasi sebenarnya di lapangan (Fukuyama, 2021).

Upaya Mengatasi Masalah

Untuk mengatasi masalah dominasi kepentingan politik sempit dan menurunnya kepercayaan masyarakat, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diberi dukungan penuh untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat publik. Selain itu, reformasi partai politik juga sangat penting. Partai-partai politik harus membuka diri terhadap partisipasi yang lebih luas dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan.

Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Menurut Tan, A. (2024), pendidikan politik yang baik dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam proses politik. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi pengawas yang efektif bagi para wakil mereka dan memastikan bahwa kepentingan mereka benar-benar diperjuangkan.

Pendidikan merupakan manifestasi budaya manusia yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, perubahan dalam pendidikan adalah sesuatu

Fiandani Rizki P., dkk. Dominasi Kepentingan Politik Sempit dan Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan

yang alami dan harus terjadi seiring dengan evolusi peradaban. Perubahan ini mengacu pada peningkatan di semua tingkatan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai persiapan untuk masa depan. Kualitas atau standar kelulusan lembaga pendidikan sangat terkait dengan proses pembelajaran, yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kurikulum, tenaga pendidik, metode pengajaran, evaluasi, fasilitas, manajemen sekolah, dan iklim kerja (Irianti, 2017).

Kemajuan ilmu pengetahuan didorong oleh kreativitas, skeptisisme, keterbukaan terhadap kontribusi ilmu baru, serta keuletan dalam mempertanyakan kontribusi yang ada dan konsensus ilmiah yang berlaku, serta dalam mencari jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi (Lestari, 1999). Perkembangan teknologi juga memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam dunia informasi, terdapat berbagai cara penyampaian berita, salah satunya adalah artikel, yang memiliki beragam jenis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, negara maju dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi (*high trust society*) karena warganya saling percaya (*interpersonal trust*) dan juga mempercayai pemerintah mereka (*institutional trust*). Sebaliknya, banyak negara berkembang merupakan masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah (*low trust society*). Negara berkembang seringkali memiliki tata kelola pemerintahan yang kurang akuntabel, sehingga tidak efisien dan efektif. Akibatnya, aktivitas ekonominya menjadi mahal karena adanya banyak biaya tak terduga yang disebabkan oleh oknum regulator.

Penanganan ketidakpercayaan institusional sangatlah penting, terutama terkait dengan korupsi. Studi oleh Gründler dan Potrafke (2019) menunjukkan bahwa volume ekonomi suatu negara dapat berkurang hingga 17% dalam jangka panjang jika persepsi masyarakat terhadap korupsi tinggi. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, diperlukan strategi moderat serta pengawasan oleh masyarakat sebagai pelengkap pengawasan formal yang sudah ada. Upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif diperlukan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparaturnya dapat segera pulih.

Fiandani Rizki P., dkk. Dominasi Kepentingan Politik Sempit dan Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan

Upaya preventif untuk mencegah ketidakpercayaan institusional sangatlah penting dilakukan, mengingat biaya sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terlalu besar. Upaya ini bukan hanya tugas pemerintah dan aparaturinya, tetapi juga seluruh masyarakat. Indonesia harus menjadi masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi agar mampu menjadi negara maju pada tahun 2045. (Sukoco.B.M., 18 Apr 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, I. 2023. Kasus Korupsi dan Dominasi Kepentingan Politik Sempit di Indonesia. <https://www.liputan6.com>. Diakses 2 Mei 2024.
- Asniawati, S. 2023. Mengapa Masih Ada Masyarakat yang Tidak Percaya kepada Pemerintah?. <https://www.kompasiana.com>. Diakses 2 Mei 2024.
- D74. 2021. Kenapa Kita Semakin Meragukan Pemerintah?. <https://www.pinterpolitik.com>. Diakses 2 Mei 2024.
- Fiansyah, R. 2013. Indonesia Dikendalikan Elite Parpol !. <https://nasional.kompas.com>. Diakses 2 Mei 2024.
- Hadiz, V. 2023. Ketidakpercayaan Publik dan Stabilitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*. 10(1).
- Harsono, A. 2024. Mengatasi Krisis Kepercayaan dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*. 15(2).
- Irianti, P. 2017. Produktifitas Penulis Artikel Majalah Ilmiah Psikologi Universitas Gadjah Mada Menggunakan Dalil Lotka. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*. 13(2): 205–216.
- Indonesia, L. S. 2023. Survei Kepercayaan Publik terhadap Parlemen. <https://www.lsi.or.id>. Diakses 2 Mei 2024.
- Kompas. 2023. Skandal Anggota DPR: Dari Suap hingga Konflik Kepentingan. <https://www.kompas.com>. Diakses 2 Mei 2024.
- Lestari, A. W., dkk. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga.
- Liddle, R. 2022. *Oligarki dan Politik di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Nicola, A. & Suyatmiko, W. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. <https://www.transparency.org>. Diakses 2 Mei 2023.
- Prastiasa, F. R., dkk. 2023. Dominasi Kepentingan Politik Sempit Dan Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Perwakilan. *Seminar Nasional FPMIPA IKIP PGRI Bojonegoro 2023*, Bojonegoro: Oktober 2023.
- Sukoco, B. M. 2023. Memulihkan Kepercayaan Publik. <https://news.detik.com>. Diakses 2 Mei 2024.
- Tan, A. 2024. *Pendidikan Politik dan Partisipasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas.

- Wardani, I. G. A. K., dkk. 2008. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Universitas Tebuka.
- Winters, J. 2021. *Oligarki dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.